

## **Update Progress Tentang Resolusi Konflik dan Program Peningkatan Kapabilitas (Update Kemajuan ke-3 – 31 Oktober 2023)**

PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) telah berkolaborasi dengan Earthworm Foundation (EF) untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan upaya penyelesaian konflik sejak Oktober 2022.

Komitmen kami terhadap transparansi tercermin dalam pembaruan kemajuan pertama yang dirilis pada bulan Februari 2023, dengan fokus pada keterlibatan masyarakat. Pembaruan berikutnya pada bulan Agustus 2023 menguraikan komitmen kami untuk meningkatkan proses penyelesaian konflik dan menambah kapasitas tim TPL. Pada pembaruan ketiga ini, kami menyajikan kemajuan yang dicapai TPL dari Juli hingga Oktober 2023 dalam program penyelesaian konflik dan peningkatan kapasitas TPL.

### **I. Resolusi konflik**

#### **1.1 Hasil Konsultasi Publik Pemetaan Partisipatif di Desa Sion Hudon Timur**

Pemetaan partisipatif berfungsi sebagai alat yang sangat penting, memberdayakan masyarakat untuk menentukan batas-batas, dan proses kolaboratif yang mendorong pembangunan hubungan dengan masyarakat. Elemen-elemen ini sangat penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik terkait pertanahan. EF mematuhi prinsip-prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) selama kunjungan dan interaksi dengan masyarakat untuk inisiatif ini. EF memperkenalkan diri langsung kepada pemimpin lokal, memberikan informasi dalam Bahasa Indonesia. Keterlibatan intensif hanya terbatas pada komunitas yang menyetujui dan semua kunjungan didokumentasikan. Transparansi dipertahankan melalui pembuatan rancangan notulen pertemuan masyarakat, pendistribusian notulen akhir yang disepakati dalam bentuk kertas, dan penyimpanan salinan yang sama untuk dicatat.

Sejak awal tahun 2023, EF bersama TPL aktif membina komunikasi dengan Sionom Hudon Timur (SHT) dan Desa Simataniari. Inisiatif ini didorong oleh kedekatan geografis dan tumpang tindihnya wilayah tersebut dengan konsesi perusahaan, yang semakin diperburuk dengan adanya klaim lahan di Simataniari. Kegiatan pemetaan partisipatif di desa SHT yang dimulai pada bulan Maret 2023, melibatkan konsultasi ekstensif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi pemangku kepentingan dengan masyarakat, tokoh adat setempat, dan perangkat desa SHT. Peta indikatif dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat desa SHT dan pemerintah daerah mengenai batas desa.

Setelah pemetaan partisipatif selesai, dilakukan konsultasi dengan masyarakat setempat, aparat kecamatan dan kabupaten yang bertujuan untuk mengkaji secara cermat peta indikatif batas wilayah. Hal ini memungkinkan EF dan TPL untuk merevisi peta berdasarkan masukan yang diterima dari masyarakat. Pemerintah daerah juga memberikan masukan selama diskusi ini.

Hasil dari proses pemetaan partisipatif diungkapkan dalam konsultasi publik yang diadakan di Desa SHT pada tanggal 21 Agustus 2023. Forum ini, selain presentasi hasil pemetaan, juga berfungsi sebagai platform untuk diskusi ekstensif mengenai tata guna lahan dan deliniasi batas desa SHT. Berbagai pemangku kepentingan terlibat aktif dalam acara ini yang berjumlah 471 peserta, antara lain

masyarakat desa SHT, pemerintah, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat desa yang dikenal dengan “Raja Huta”. Begitu pula perwakilan pemerintah dari Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Humbang Hasundutan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Dolok Sanggul, serta desa-desa tetangga antara lain Simataniari, Sion Sibulbulon, Sihas Habinsaran, Sion Selatan, dan Sion Timur yang megirimkan kepala desa atau perwakilannya masing-masing. Perwakilan dari Lembaga Adat Sionom Hudon berpartisipasi aktif dalam acara tersebut, menyoroti keterlibatan mereka. Lembaga ini sangat mendukung Pemetaan Partisipatif yang sedang berlangsung di SHT dan berharap dapat memperluas pendekatan ini ke desa-desa lainnya. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumatra Forest sekaligus mantan Bupati Kabupaten Serdang Begadai pun berbagi wawasan untuk memperkaya wacana.

Puncak acara ini adalah pemaparan proses Pemetaan Partisipatif Desa SHT yang dibawakan oleh perwakilan masyarakat SHT. Pemaparan tersebut menjelaskan proses awal pemetaan partisipatif hingga hasil pemetaan partisipatif. Selanjutnya dilakukan diskusi secara mendalam mengenai batas Desa Sionom Hudon Timur dan memfasilitasi diskusi kolaboratif antar pemangku kepentingan serta memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pemetaan. Pemaparan ini juga menjelaskan bahwa pemetaan partisipatif adalah sebuah proses unik yang terjadi di Desa SHT. Perjalanan ini ditandai dengan inisiatif komprehensif yang dilakukan melalui kemitraan antara TPL, EF, dan masyarakat SHT.

Langkah-langkah selanjutnya yang disepakati oleh seluruh peserta pada penutupan konsultasi publik:

1. Peta batas Desa SHT akan direvisi dengan mempertimbangkan masukan berharga dari para pemangku kepentingan. EF dan TPL akan membagikan hasil peta yang disempurnakan dan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk otoritas pemerintah dan masyarakat lokal.
2. Pemerintah Desa SHT akan bekerjasama dengan TPL, EF, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemerintah Kecamatan Parlilitan, KPH XIII Dolok Sanggul, dan instansi terkait untuk menyimpulkan dan menyempurnakan peta. EF dan TPL bertujuan untuk menyelesaikan penyempurnaan peta pada kuartal pertama tahun 2024.
3. Peta yang telah selesai akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendapatkan persetujuan resmi dan pengakuan sebagai batas resmi desa.
4. Masyarakat memilih EF untuk memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dan SHT. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk secara efektif mengelola wilayah yang tumpang tindih antara desa dan konsesi. Upaya ini memerlukan upaya kerja sama dengan TPL. EF akan memfasilitasi kesepakatan (Nota Kesepahaman) antara masyarakat Desa SHT dan TPL, yang secara khusus menargetkan perlindungan kawasan hutan dan pelestarian tanaman kemenyan di wilayah yang tumpang tindih. MoU tersebut akan menguraikan kesepakatan komprehensif mengenai kerangka tata kelola untuk bidang-bidang yang tumpang tindih.



Mantan Bupati Serdang Begadai menyampaikan materi tentang peluang pasar pertanian



KPH XIII menyampaikan tanggapan terkait pemetaan Partisipatif di Desa SHT



Tamu undangan dari Kabupaten, Kecamatan, Kepala Desa tetangga (mewakili), EF dan Pemateri



Masyarakat Desa Sinom Hudon Timur dan desa sekitarnya yang hadir dalam konsultasi publik



Penandatanganan berita acara konsultasi publik oleh Camat Parililitan, KPH XII, dan perwakilan desa tetangga



Foto bersama yang menampilkan kepala desa tetangga dan perwakilannya, pejabat pemerintah dan EF setelah penandatanganan

## 1.2 Pemetaan Partisipatif di Simataniari (Komunitas Pargamanan Bintang Maria/PBM)

Pada tahun 2016, TPL menerima informasi dari Pemerintah Indonesia mengenai klaim lahan yang melibatkan masyarakat Pargamanan Bintang Maria (PBM). Menanggapi hal ini, TPL, dengan dukungan dari EF, telah secara aktif melakukan komunikasi dengan desa Simataniari, tempat tinggal komunitas PBM, yang bertujuan untuk mencari penyelesaian damai dan mendorong upaya kolaborasi.

Berangkat dari keberhasilan pemetaan partisipatif di SHT, pada kuartal kedua tahun 2023, EF telah terlibat dalam sesi diskusi dengan masyarakat di Simataniari, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Parililitan dan pemangku kepentingan lokal lainnya untuk membahas inisiatif ini sebagai upaya resolusi konflik. Sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC, tim secara resmi memperkenalkan diri, menjelaskan konsep dan manfaat pemetaan partisipatif ke seluruh Desa Simataniari, sekaligus menerima masukan dan mempertimbangkan perspektif mereka dengan sangat serius. EF bersama TPL akan terus menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat di Simataniari dan otoritas pemerintah, selain berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil di wilayah tersebut.

EF akan melakukan pemetaan partisipatif di Simataniari hanya setelah mendapat persetujuan dari masyarakat. Inisiatif ini akan melibatkan secara aktif masyarakat di Desa Simataniari dan aparaturnya, serta upaya kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten serta Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pendekatan multi-pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan dukungan terhadap inisiatif di Desa. Jika masyarakat sudah memberikan persetujuan, maka proses pemetaan partisipatif di Desa Simataniari akan dijadwalkan pada triwulan I tahun 2023.

## II. Program Peningkatan Kemampuan

### 2.1 Penyempurnaan Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Standar (SOP)

EF telah melakukan penilaian komprehensif terhadap SOP TPL terkait keluhan lahan dan konsesi. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai elemen dalam SOP, meliputi ruang lingkup, tujuan, instruksi kerja, dan pembagian tanggung jawab. Sebuah tonggak penting adalah

lokakarya yang diadakan pada bulan November 2023. Acara ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan TPL dengan menerapkan sistem resolusi konflik, memberikan panduan tentang prinsip-prinsip FPIC, mengelola keluhan eksternal dengan baik, dan merumuskan SOP manual. Inisiatif proaktif ini bertujuan untuk memperkuat kerangka operasional TPL, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik dan memfasilitasi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

EF akan memfasilitasi lokakarya khusus untuk mengembangkan SOP komprehensif yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan spesifik TPL. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan rancangan SOP yang mencakup penyelesaian pengaduan dan konflik, pedoman FPIC, dan protokol komunikasi eksternal pada kuartal pertama tahun depan. Selanjutnya, prosedur baru ini akan menjalani tahap percontohan yang dipandu oleh EF untuk memastikan efektivitasnya. Setelah berhasil menyelesaikannya, TPL akan melanjutkan pembuatan SOP, dengan fokus pada peningkatan prosedur penanganan pengaduan.

## **2.2 Pemetaan Konflik**

Untuk meningkatkan kemampuan TPL dalam pemetaan konflik yang komprehensif, serangkaian langkah penting telah ditetapkan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat pendekatan pemetaan konflik yang dilakukan perusahaan, memastikan keakuratan data, dan memperkuat manajemen konflik yang proaktif. Langkah-langkah yang ditetapkan meliputi:

1. Verifikasi data konflik
2. Peningkatan detail dalam deskripsi konflik
3. Mengatasi rencana penyelesaian konflik yang tidak lengkap
4. Upaya konsolidasi

Inisiatif ini bertujuan untuk menstandarisasi data konflik yang dikumpulkan oleh Departemen Planning dan Departemen Social Capital di seluruh sektor TPL. Tujuannya adalah untuk membangun pusat data konflik yang terintegrasi dan komprehensif yang mencerminkan kenyataan di lapangan secara akurat.

Selain itu, TPL telah menerapkan hotline khusus untuk mengelola, menangani, dan menyelesaikan keluhan secara efisien. TPL berkomitmen untuk menanggapi semua keluhan melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif, membina keterlibatan kolaboratif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Untuk penyampaian keluhan, silakan menghubungi kami melalui saluran berikut:

PT. Toba Pulp Lestari: Kontak +62 812 621 0461 atau email ke [pengaduan@tobapulp.com](mailto:pengaduan@tobapulp.com)

Earthworm Foundation: Kontak +62 812 9598 3484 atau email ke [w.daeli@earthworm.org](mailto:w.daeli@earthworm.org)

Untuk pemahaman rinci tentang mekanisme pengaduan kami, silakan kunjungi:

<https://www.tobapulp.com/en/grievance-mechanism/>